



Vol 20, No. 1 (2021)

Research Article

Islam di Purwokerto Awal Abad ke-20 M

Moch. Dwi Haryanto

UIN Sunan Kalijaga

Email: mdwiharyanto27@gmail.com

Abstract: The 20th Century was a new phase of Dutch colonialism in Indonesia. The existence of colonialism in Indonesia brought impacts and changes in several aspects such as economic, politic, social, and culture. Some districts in Java run into a transition from a traditional society into a modern one. To muslims, the changes brought another impact. Muslim in some places in Java comonly thrive into a positive progress. It could be seen in the forming of Islamic organization, Islamic pers growth, and modernization of Islamic education. In Purwokerto, in the early 20th century, it grew and became one of the busiest cities in the district of Banyumas residency as well as one of the most important cities in the southern part of Central Java. That growth made a certain impact to Muslim community in Purwokerto. In the early 20th century, they were divided into 4 religious organizations thus are Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ahmadiyah. Besides, the growth of Muslim community in Purwokerto in this era was along with the growth of Christianity and Chatolic community which was introduced by Dutch Colony. Therefore, this research aims to find out had Muslim community in Purwokerto made progress as were in other common district in Java in that era or vice versa? and why?

Keywords: Islam; Local History; Modernization; Purwokerto

Abstrak: Abad 20 M merupakan babak baru penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Keberadaan kolonialisme di Indonesia membawa dampak dan perubahan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Beberapa wilayah di Pulau Jawa mengalami transisi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Bagi umat Islam perubahan tersebut membawa dampak tersendiri. Umat Islam di beberapa tempat di Pulau Jawa umumnya mengalami kemajuan seperti munculnya organisasi Islam, berkembangnya pers Islam, dan modernisasi pendidikan Islam. Adapun kondisi Purwokerto, pada awal abad ke-20 M, mengalami perkembangan dan menjadi salah satu kota tersibuk di wilayah Karesidenan Banyumas serta menjadi salah satu kota terpenting di Jawa Tengah

bagian Selatan. Perkembangan tersebut membawa dampak perubahan terhadap umat Islam. Umat Islam di Purwokerto sendiri pada awal abad ke-20 M terbagi dalam 4 organisasi keagamaan yaitu Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ahmadiyah. Selain itu, perkembangan umat Islam di Purwokerto pada masa ini juga bersamaan dengan perkembangan agama Kristen dan Katolik yang diperkenalkan oleh pihak kolonial Belanda. Maka, pada penelitian ini peneliti bermaksud untuk melihat apakah umat Islam di Purwokerto mengalami perkembangan atau kemajuan sebagaimana yang pada umumnya terjadi di wilayah lain di pulau Jawa pada kisaran tahun tersebut atau sebaliknya? Mengapa demikian?

Kata Kunci : Purwokerto; Islam; Modernisasi; Sejarah Lokal

A. PENDAHULUAN

Awal abad ke-20 M merupakan babak baru dari penguasaan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap kota-kota yang berada di wilayah Nusantara. Sejak abad ke-19 M beberapa wilayah di pulau Jawa telah berada di bawah campur tangan Pemerintah Kolonial Belanda hampir dalam berbagai bidang. Keberadaan Belanda di Indonesia tidak lagi hanya sebatas mencari wilayah dagang namun juga membawa dampak pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa di antaranya seperti memantapkan birokrasi pemerintahan model barat, memperkenalkan sistem pendidikan barat, menyebarkan agama Kristen dan Katolik, serta membangun tata kota modern khas dunia barat.¹

Beberapa kota di Jawa khususnya mengalami perkembangan modernisasi yang cukup baik,² seperti pembangunan infrastruktur (jalur transportasi, jalan, trem, dan lain sebagainya), pengembangan sistem pendidikan modern, serta modernisasi/ industrialisasi pengolahan hasil tani (mengolah tebu menjadi gula). Di balik perkembangan kota ke arah modernisasi tidak jarang justru merugikan masyarakat pribumi, seperti penerapan pajak yang tinggi, penerapan hasil upah yang minim, serta dualisme pendidikan tradisional dan modern. Fenomena tersebut kemudian mendapat respon dari masyarakat pribumi, baik dalam bentuk perang, pemberontakan, maupun gerakan-gerakan sosial.³

Meskipun begitu, kebijakan-kebijakan Belanda pada awal abad ke-20 M tidak selamanya berdampak negatif. Awal tahun 1900-an, Pemerintahan Hindia Belanda yang telah mengeruk berjuta-juta gulden dari Indonesia dituntut untuk memajukan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat tanah jajahannya. Melalui pidatonya pada tahun 1901 M, Ratu Belanda menyatakan bahwa “negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi dari penduduk Indonesia”.⁴ Kebijakan ini disebut dengan *etische politiek* (politik etis). Seiring dengan adanya kebijakan Politik Etis tersebut, maka pemerintahan Hindia Belanda diharuskan

¹ John. L Esposito, *Islam in Asia: Religion, Politics, & Society* (New York: Oxford University Press, 1987), hlm. 206.

² Sri Margana and M Nursam, *Kota-Kota Di Jawa: Identitas, Gaya Hidup, Dan Permasalahan Sosial* (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 12.

³ Pendahuluan oleh Prof. Dr. Djoko Surjo dalam Taufik Abdullah, *Indonesia Dalam Arus Sejarah* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 3.

⁴ Marwati Djoened Poesponegoro and Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V: Jaman Kebangkitan Nasional Dan Masa Akhir Hindia Belanda* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 34.

untuk menjalankan kebijakan desentralisasi, perubahan pemerintahan, perbaikan kesehatan rakyat, emigrasi, pertanian dan peternakan, serta pembangunan irigasi dan lalu lintas.⁵

Sejak dasawarsa pertama hingga kedua abad ke-20 M, kebijakan tersebut telah mulai diterapkan di Purwokerto. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya beberapa sarana pendidikan, kesehatan, dan irigasi untuk penduduk pribumi.⁶ Kebijakan inilah, terutama dalam bidang pendidikan, yang selanjutnya memberikan dampak positif terhadap perkembangan intelektual di Purwokerto secara umum dan umat Islam secara khusus. Kebijakan yang mengarah pada perkembangan modernisasi seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem pendidikan modern memberikan dampak positif. Kebijakan pemikiran dunia modern sedikit banyak mempengaruhi pola pikir umat Islam untuk mengembangkan agamanya melalui sebuah organisasi. Umat Islam di beberapa kota di Pulau Jawa mengalami perubahan tersebut, termasuk di Purwokerto.

Purwokerto merupakan salah satu kota tersibuk di Karesidenan Banyumas. Awalnya hingga pertengahan abad ke-19 M Purwokerto merupakan kota yang sepi sebagaimana sebagian besar kota di Pulau Jawa. Namun dalam beberapa tahun kemudian Purwokerto berkembang menjadi salah satu kota penting di Jawa Tengah bagian selatan. Salah satu faktor pendukung perkembangan dan kemajuan wilayah Purwokerto adalah dibangunnya pabrik gula dan perkebunan tebu pada tahun 1893 M serta pembangunan rel-rel kereta api pada kisaran tahun 1890-an menjadi jalur distribusi perdagangan yang cukup ramai. Purwokerto memegang peranan penting bagi pertumbuhan wilayah-wilayah lain di sekitarnya.⁷ Hingga permulaan abad ke-20 M, distrik Purwokerto yang merupakan bagian dari Karesidenan Banyumas telah memiliki pabrik gula, areal perkebunan tebu, jalur trem uap, sistem penerangan listrik, jaringan air minum, *kantoor post* dan *telegraaf*, bank, hingga berbagai macam fasilitas pendidikan.⁸

Situasi dan kondisi Purwokerto pada masa tersebut yang mengarah pada modernisasi serta pengaruh kebijakan-kebijakan Belanda menjadi salah satu alasan untuk melihat apakah hal tersebut memberikan dampak pada perkembangan Islam di Purwokerto sebagaimana beberapa wilayah lainnya di Pulau Jawa? Kemudian penelitian ini ingin melihat kondisi umat Islam di Purwokerto di tengah proses modernisasi serta berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Adapun teori yang akan digunakan untuk membantu menganalisis masalah tersebut adalah teori dari W.F. Wertheim yang menyatakan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia pada abad ke-20 M tidak dapat dilepaskan dari proses modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Perubahan terjadi dikarenakan adanya intensifikasi politik kolonial Belanda melalui proses birokratisasi, komersialisasi, industrialisasi, edukasi, inovasi, dan renovasi teknologi. Adanya hal tersebut kemudian

⁵ Ibid., hlm. 40-41.

⁶ Prima Nurahmi Mulyasari, "Modernisasi Dan Tata Ruang Kota Purwokerto 1900-1935," *Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya* 15 (2014): hlm. 610.

⁷ Ibid., hlm. 605.

⁸ Ibid., hlm. 610.

secara tidak langsung memunculkan mobilisasi sosial yang lebih tinggi dan golongan intelegensia.⁹ Hal serupa diungkapkan juga oleh Karel Steenbrink bahwa kebijakan-kebijakan Pemerintahan Hindia Belanda berdampak pada “kebangkitan Islam” atau sedikitnya “intensifikasi Islam”. Beberapa di antaranya, liberalisasi perjalanan naik haji, perbaikan pendidikan rakyat (*volkscholen*), penyebaran literatur Islam, dan kemunculan organisasi keagamaan.¹⁰

B. UMAT ISLAM DI PURWOKERTO AWAL ABAD KE-20 M

Awal abad ke-20 M merupakan awal kebangkitan pergerakan nasional baik yang berjiwa nasionalis maupun agamis. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda sendiri yang bermaksud memberikan penghidupan yang layak pada penduduk pribumi. Salah satu kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang mendorong terjadinya kemajuan di kalangan umat Islam adalah kebijakan politik etisnya. Kebijakan ini kemudian menelurkan sekolah-sekolah desa hingga sekolah-sekolah tingkat lanjutan. Kebijakan ini juga menyadarkan masyarakat petani untuk tidak hanya menjadi pion, namun menjalankan pion dan memainkannya. Selain itu pernyataan Snouck Hurgronje berkaitan dengan tidak perlu mengkhawatirkan kebiasaan ataupun kegiatan keagamaan umat Islam,¹¹ memberikan cukup ruang bagi umat Islam untuk lebih memperdalam agamanya. Dengan begitu mereka dapat memahami bahwa agama bukan hanya sebatas rutinitas namun merupakan sebuah identitas.

Selain itu, kondisi memprihatinkan yang dialami masyarakat, menuntut golongan yang lebih mampu untuk tidak hanya berdiam diri. Rakyat yang lebih beruntung yang mengenyam pendidikan bertugas untuk memperbaiki derita rakyat. Perbaikan jalur transportasi yang terjadi pada awal abad ke-20 M ini juga tidak hanya berguna sebagai sarana pengangkutan barang industri saja, namun turut memengaruhi mobilitas masyarakat. Hal ini mempermudah pula penyebaran informasi, pemikiran-pemikiran, dan gagasan baru dari satu daerah ke daerah lainnya.

Bagi umat Islam khususnya yang berada di Purwokerto, hal tersebut membawa perubahan di beberapa bidang. Berikut ini adalah perubahan yang terjadi pada umat Islam di Purwokerto:

1. Bidang Politik

a. Pengurusan Urusan Keagamaan oleh Dewan Penghulu

⁹ Siti Maimunah, “Islam Indonesia Dalam Studi Sejarah, Sosial, Dan Budaya (Teori Dan Penerapan),” in *Islam Di Tengah Perubahan: Islam Di Surabaya Akhir Abad XIX-Awal Abad XX*, by Himayatul Ittihadiyah et al. (Yogyakarta: PKSBI Jurusan SKI Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), hlm. 33.

¹⁰ Karel Steenbrink, *Kawan Dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda Dan Islam Di Indonesia (1596-1942)*, trans. Suryan A Jamrah (Bandung: Mizan, 1995), hlm. xxvi.

¹¹ Snouck Hurgronje membagi Islam dalam tiga lapangan aktivitas: keagamaan “murni” atau ibadah, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Dalam aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan pemerintah Hindia Belanda disarankan untuk bersikap netral atau mungkin membantu untuk kelancarannya aktivitas tersebut, sedangkan dalam aktivitas kenegaraan atau politik pemerintah diharuskan tegas dan keras. Effendi Effendi, “Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje),” *TAPIS* 8, no. 1 (2012): hlm. 100.

Dalam struktur pemerintahan kegiatan keagamaan di kabupaten Purwokerto diawasi oleh penghulu. Keberadaan penghulu sebagai pengurus kegiatan keagamaan sebenarnya telah berlangsung sejak masa kerajaan Islam. Kealpaan pemerintahan Hindia Belanda tentang masalah agama Islam dan banyaknya jumlah umat Islam menjadi alasan dewan penghulu tetap dilestarikan. Sejak tahun 1882 M, melalui *Staatsblaad* Nomor 152 keorganisasi penghulu ditarik menjadi bagian dari administrasi kolonial.¹²

Adapun penghulu-penghulu yang menjabat di Purwokerto adalah K. Redjamuhammad, K. Redjasoepana (1900), K.H. Mohammad Dirdja (1931), dan K. Mohammad Sosronarto (1931). Ketiga nama pertama menjabat sebagai penghulu *landraad*, sedangkan nama yang disebut terakhir merupakan punggawa penghulu.¹³ Adapun tugas penghulu menurut G.F. Pijper meliputi pengurusan masjid, mengelola kas masjid (zakat, infak, dan sedekah), dewan peradilan agama, NTCR (nikah, talak, cerai, dan rujuk), penasehat masalah keagamaan bagi pemerintah, pemberi penerangan tentang hukum agama, dan juga pengawasan terhadap pendidikan agama Islam.¹⁴

Di samping hal-hal tersebut, penghulu *landraad* Purwokerto juga memiliki peran penting dalam hal penentuan awal bulan Ramadhan khususnya bagi wilayah Banyumas. Penghulu *landraad* Purwokerto menjadi semacam panitia penentuan awal Ramadhan bersama beberapa ulama. Hal ini dilakukan dengan cara melihat kemunculan bulan sabit ketika matahari terbenam di sebelah barat. Laporan kemunculan bulan sabit tadi kemudian dimusyawarahkan bersama para ulama. Selanjutnya, awal waktu Ramadhan ditetapkan oleh Penghulu *landraad* dan diumumkan ke wilayah-wilayah lain di sekitar Purwokerto.¹⁵

Dalam kaitannya dengan pemerintah Hindia Belanda, dewan penghulu masih mendapatkan campur tangan dari pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dapat dilihat dari adanya surat kiriman penghulu Purwokerto kepada pemerintah Hindia Belanda dan surat-surat yang dikirimkan oleh Snouck Hurgronje terkait dengan masalah kepenghuluan. Dalam surat-surat Snouck Hurgronje, ia menyebut dewan penghulu Banyumas beberapa kali sebagai perbandingan dengan dewan penghulu di wilayah lain. Ia pun beberapa kali mengirim surat yang ditujukan langsung untuk dewan penghulu Banyumas.¹⁶ Adapun salah satu isi surat yang dikirimkan oleh dewan penghulu kepada pemerintah Hindia Belanda adalah mengenai penyelewengan yang terjadi di dalam organisasi dewan kepenghuluan Purwokerto.¹⁷

¹² Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya Di Masa Kolonial* (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 20.

¹³ Penghulu *landraad* merupakan penghulu kepala tingkat kabupaten sedangkan punggawa penghulu merupakan pejabat penghulu di bawah penghulu kepala *ibid.*, hlm. 20.

¹⁴ G.F. Pijper, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam Di Indonesia 1900-1950* (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 73-82.

¹⁵ Saifudin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 31.

¹⁶ E Gobee and C Adriaanse, *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936* (Jakarta: Insis, 1991).

¹⁷ Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya Di Masa Kolonial*, hlm. 77-78.

b. Kemunculan Organisasi-Organisasi Keagamaan

Di luar administrasi pemerintahan, umat Islam di Purwokerto pada awal abad ke-20 M mulai mengenal keorganisasian atau minimal perkumpulan yang berdasarkan pada pemikiran keagamaan yang sama. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa memasuki dasawarsa pertama abad ke-20 M, perkumpulan-perkumpulan umat Islam mulai berdiri di Indonesia. Perkumpulan-perkumpulan tersebut selanjutnya mulai menyebarkan visi dan misinya ke wilayah-wilayah lain. Seiring dengan semakin mudahnya mobilisasi masyarakat ke berbagai wilayah yang berbeda, pemikiran-pemikiran tersebut sampai dan mulai berkembang di Purwokerto.

Di Purwokerto sendiri perkumpulan Sarekat Islam sudah ada sebelum tahun 1920 M. Pada kisaran tahun 1920 M, perkumpulan Sarekat Islam tersebut sudah cukup terlembaga hal ini dapat dilihat dari adanya struktur kepengurusan. Dalam tulisan Hasanmihardja diterangkan bahwa yang menjabat sebagai ketua kala itu adalah Muhammad Ma'ruf. Ia dibantu oleh dua anggota lainnya yaitu Sarwin sebagai penulis, dan Ardjokembar sebagai bendahara.¹⁸

Beberapa tahun selanjutnya, Perserikatan Muhammadiyah berdiri di Purwokerto. Masuknya perserikatan Muhammadiyah ke Purwokerto tidak terlepas dari peran K.H. Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah Pusat. Pada tahun 1920 M, K.H. Ahmad Dahlan berkunjung ke Purwokerto untuk memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Baitussalam. Pada pengajian tersebut ia mengajak kaum Muslimin untuk membersihkan akidah dari khurafat dan syirik, memurnikan ajaran Islam dari *bid'ah* melalui ajaran yang bersumber dari al Qur'an dan Sunnah, serta ajakan untuk tekun dan rajin mempelajari al Qur'an dan Hadis. Sebelum menutup pengajiannya, K.H. Ahmad Dahlan mengajak para hadirin untuk mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Ajakan ini mendapatkan reaksi pro dan kontra.¹⁹

Reaksi pro pada ajakan itu datang dari Kyai Ma'ruf dan Hasanmihardja. Keduanya menghampiri K.H. Ahmad Dahlan dan mengundangnya untuk bermusyawarah di kediaman K.H. Halimi. Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa K.H. Ahmad Dahlan akan berkunjung ke Purwokerto pada tahun 1921 M. Kunjungannya tersebut bertujuan untuk menjelaskan tentang asas dan tujuan Muhammadiyah.²⁰ Kunjungan yang kedua tersebut dilakukan di pendopo kepenghuluan. Beberapa tokoh yang hadir dalam perkumpulan tersebut adalah Muh. Ma'ruf, M. Sarwin, Ardjokembar, R. Soemardi, R. Tarekat, R. Soekardi Achmadirdjo, Muhammad Sajidi, M. Abdulraohiem, M. Chalimi, dan M. Koljubi.

¹⁸ Hasanmihardja, "Sedjarah Muhammadiyah Di Purwokerto" (n.d.): hlm. 5-6.

¹⁹ Suwarno, ed., *Sejarah Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Di Purwokerto Dan Perkembangannya Sampai Tahun 1945* (Purwokerto: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas Lembaga Pustaka dan Dokumentasi, 1997.), hlm. 13-14.

²⁰ Ibid., hlm. 15.

Pertemuan tersebut diisi oleh K.H. Ahmad Dahlan sesuai dengan kesepakatan pada musyawarah sebelumnya.²¹

Sebelum perkumpulan di pendopo kepenghuluan berakhir, para hadirin menyatakan diri sebagai anggota Muhammadiyah, kemudian dibentuklah kepengurusan Persyarikatan Muhammadiyah di Purwokerto. Pada saat itu Purwokerto belum resmi menjadi Cabang Persyarikatan Muhammadiyah, baru pada tahun 1922 M berdasarkan Surat Ketetapan no. 11/BM tertanggal 15 November 1922, Purwokerto resmi menjadi Cabang Persyarikatan Muhammadiyah. Adapun susunan pengurus Muhammadiyah cabang Purwokerto yang pertama adalah sebagai berikut:

Ketua : K. Ma'ruf

Staf Pengurus : Hasanmihardja, H. Abdurochim, Z. Yastrawirya, Mochamad Sayidi, Yasmirdja, Sanasngad, Jarnuji, dan Tarikat

Staf Ibu : Ny. Hasanmihardja dan Hj. Abdullah.²²

Organisasi keagamaan lainnya yang juga muncul pada awal abad ke-20 M di Purwokerto adalah Ahmadiyah. Organisasi ini mulai dikenal di Purwokerto sejak tahun 1928 M. Hal ini dikarenakan R. Ng. Djojogito selaku ketua gerakan Ahmadiyah dari Yogyakarta menjabat sebagai guru di Purwokerto. Setelah kelahirannya di Yogyakarta, Ahmadiyah memindahkan pusat kegiatannya di Purwokerto. Hal ini dikarenakan banyak tokohnya yang tinggal di Purwokerto. Salah satu tokoh Ahmadiyah yang berpengaruh adalah Mirza Wali Ahmad Baig.²³ Ia merupakan utusan Ahmadiyah dari Lahore, India. Sebelumnya Wali Ahmad Baig tinggal di Yogyakarta. Ia harus pindah ke Purwokerto dikarenakan adanya konflik antara organisasi Ahmadiyah dengan organisasi Muhammadiyah Yogyakarta.²⁴

Kegiatan Ahmadiyah pada masa tersebut memang terfokus di Purwokerto. Muktamar pertama Ahmadiyah pada tahun 1929 M berlangsung di kota ini. Berdasarkan muktamar tersebut maka dibentuklah beberapa cabang Ahmadiyah, seperti cabang Purwokerto, cabang Purbalingga, Pliken, Surakarta, dan Yogyakarta. Cabang Ahmadiyah Purwokerto diketuai oleh Kiai Ma'ruf, mantan ketua Persyarikatan Muhammadiyah Purwokerto yang pertama. Kepengurusan Ahmadiyah Purwokerto kemudian disempurnakan pada tahun 1933 M, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Sahidan Martojowono

²¹ Hasanmihardja, "Sedjarah Muhammadiyah Di Purwokerto," hlm. 6.

²² Suwarno, ed., *Sejarah Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Di Purwokerto Dan Perkembangannya Sampai Tahun 1945*, hlm. 15-16.

²³ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 235.

²⁴ Awalnya gerakan Ahmadiyah di Yogyakarta diterima dengan baik oleh anggota Muhammadiyah terutama golongan muda dan intelektualnya. Namun setelah kedatangan Abdul Alim seorang ulama dari India, terjadi kerenggangan antara Muhammadiyah dengan Ahmadiyah. Ia menyampaikan perbedaan-perbedaan pandangan yang terdapat pada gerakan Ahmadiyah. Hal ini meyakinkan gerakan Muhammadiyah bahwa pandangan keagamaan Ahmadiyah berbeda dengan Muhammadiyah. Hal inilah yang menyebabkan Wali Ahmad Baig harus pindah ke Purwokerto. Ibid., hlm. 191.

Wakil Ketua : Sumardi
Sekretaris : Kusen Wirjodihardjo
Wakil Sekretaris : Kiran
Bendahara : Mahwari.²⁵

Selain organisasi dari golongan modern tersebut, golongan tradisional juga mulai membentuk keorganisasian. Berbeda dengan golongan modern yang mengembangkan keorganisasiannya di wilayah perkotaan, golongan tradisional yang diwakili oleh organisasi Nahdlatul Ulama muncul pertama kali di Sokaraja Kota Kawedanan Kecil yang berjarak kurang lebih 9 km dari Purwokerto. Kemunculan organisasi Nahdlatul Ulama di Karesidenan Banyumas dimulai dengan kedatangan Hadlatus Syaikh Hasyim Asyari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Keduanya meresmikan Nahdlatul Ulama cabang Sokaraja pada tahun 1932 M. Cabang inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama di daerah Banyumas, termasuk Purwokerto.²⁶

Kemunculan organisasi-organisasi Islam tersebut menjadi cikal bakal perkembangan umat Islam Purwokerto. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam semakin terorganisir dan terstruktur dengan lebih baik. Organisasi-organisasi inilah yang selanjutnya memfokuskan kegiatannya pada kemajuan umat Islam dalam berbagai bidang. Namun, pada masa kolonial gerakan organisasi Islam dalam bidang politik masih dibatasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pemerintah Hindia Belanda mendirikan *politie inlichting dienst* atau polisi bagian penyelidikan kegiatan-kegiatan politik. Hasanmihardja menyebutkan bahwa institusi inilah yang bertugas untuk mengintai dan mengawasi gerakan politik organisasi Islam. Beberapa di antaranya membatasi perizinan mengadakan rapat dan pengintaian kegiatan musyawarah. Kesalahan pembicaraan dalam musyawarah dapat menggiring ketua organisasi ke pengadilan.²⁷

Kaum muslim terpelajar memiliki peran besar dalam pendirian suatu organisasi keagamaan. Dilihat dari tokoh-tokoh yang berperan di setiap organisasi tersebut, kaum muslim terpelajar juga memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat awam. Selain itu dengan adanya organisasi-organisasi keagamaan tersebut juga dapat menjadi konter bagi gerakan umat Kristen di Purwokerto, sehingga umat Islam Purwokerto masih dapat menunjukkan eksistensinya hingga saat ini.

2. Bidang Sosial

a. Aliran Baru dan Aliran Kuno

Munculnya organisasi masyarakat yang bernaafaskan Islam menjadi salah satu langkah awal perkembangan umat Islam di suatu wilayah. Di sisi lain kemunculan

²⁵ Ibid., hlm. 238.

²⁶ Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, hlm. 114.

²⁷ Hasanmihardja, "Sedjarah Muhammadiyah Di Purwokerto," hlm. 13.

organisasi Islam juga menyebabkan terbaginya kaum muslimin ke dalam dua golongan yang berbeda. Adanya perbedaan pandangan keagamaan dari organisasi keagamaan yang berkembang pada awal abad ke-20 M, membagi umat Islam menjadi golongan tradisional dan golongan modernis atau menurut Deliar Noer dalam bukunya *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, umat Islam dapat dibagi menjadi golongan tradisi dan golongan pembaharu.²⁸

Di Purwokerto pada tahun 1900 – 1920 M, belum terlihat adanya kemunculan kedua golongan tersebut. Baru pada kisaran tahun 1920 M, menurut Hasanmihardja umat Islam di Purwokerto mulai terjadi pengelompokan. Pengelompokan ini memang tidak serta merta mengikrarkan diri sebagai suatu kelompok, namun pengelompokan ini dapat dilihat dari kesamaan pemikiran dan pemahaman. Pengelompokan ini juga dapat dilihat dari pro atau kontranya suatu kelompok terhadap hal-hal tertentu.

Di Purwokerto, pengelompokan umat Islam mulai terjadi sejak maraknya pengajian tentang tafsir al Qur'an pada kisaran tahun 1920 M. Dua tokoh yang berperan dalam pengajian tersebut adalah Kyai Haji Chalimi dan Kyai M. Koljubi. Keduanya memberikan pengajaran tafsir al Qur'an yang mulai menghidupkan akal dan fikiran para siswanya. Pengajaran ini bertujuan agar umat Islam tidak hanya pandai membaca namun juga mengerti arti dan maksud ayat-ayat al Qur'an. Kegiatan pengajian tersebut tidak hanya dilaksanakan di Purwokerto, namun juga di wilayah sekitarnya seperti Ajibarang, Rawalo, Sokaraja, Banyumas, Jatilawang, Patikraja, Bumiayu, dan lain sebagainya. Menurut Hasanmihardja, Kyai Haji Koljubi mempunyai keistimewaan dalam cara berpidatonya. Ia benar-benar bersemangat ketika berpidato. Ia mampu untuk membakar semangat dalam rangka memberantas kemusyrikan, *bid'ah*, dan khurafat.²⁹

Berdasarkan alasan tersebut, maka menurut Hasanmihardja muncul dua kelompok Islam di Purwokerto, masyarakat mengenalnya dengan sebutan aliran kuno atau kolot dan aliran baru atau dianggap pula kaum wahabi. Aliran baru menganggap bahwa perlu adanya penafsiran al Qur'an dan Hadits, sedangkan aliran kuno menganggap bahwa hal tersebut tabu. Hal ini dapat dilihat dari adanya reaksi aliran kuno terhadap pengajian tafsir al Qur'an. Aliran kuno juga mengadakan pengajian di Masjid Kota dengan tema yang berhubungan dengan

²⁸ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), hlm. 320-322 Menurut Deliar Noer, golongan tradisi lebih menekankan pada soal-soal agama, din atau ibadah. Selain itu kepatuhan atau taklid buta terhadap Kyai atau Syaikh menjadi ciri khas golongan tradisi. Ilmu pengetahuan yang didapatkan merupakan pengalihan atau pewarisan searah, dari Kyai ke santri. Ilmu pengetahuan yang ditekankan lebih pada hafalan daripada pemahaman. Deliar Noer mengelompokkan kyai, pesantren, dan tarekat ke dalam golongan tradisi tersebut. Adapun golongan modern/ pembaharu adalah mereka yang berpandangan pada pemurnian Islam. Umat Islam Indonesia harus kembali kepada Islam yang bebas dari segala macam bentuk takhayul, *bid'ah*, dan khurafat. Selain itu masih menurut Deliar Noer golongan pembaharu merupakan golongan yang mengembalikan sifat dasar Islam. Islam merupakan agama yang sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan. Islam juga dapat berarti kemajuan. Islam mendorong umatnya untuk menggali ilmu pengetahuan, mengembangkan sains, dan memperhatikan kedudukan wanita.

²⁹ Hasanmihardja, "Sedjarah Muhammadiyah Di Purwokerto," hlm. 4-5.

penafsiran al Qur'an. Namun, pembahasan yang disampaikan mengenai hukum menerjemahkan atau menafsirkan al Qur'an. Aliran Kuno bahkan mendatangkan ulama ternama dari Kudus, Kyai Asnawi, untuk memberikan ceramah tersebut. Pengajian ini dihadiri oleh banyak kaum muslimin dari wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Hal ini jika dilihat dari tradisi aliran kuno dapat diartikan bahwa aliran kuno ingin memberikan penerangan perihal penafsiran serta penerjemahan al Qur'an dan Hadits cukup diserahkan kepada para Kyai atau Syaikh.³⁰

Kegiatan pengajian tersebut ternyata tidak dapat berjalan dengan lancar. Pada saat sesi tanya jawab terjadi kekacauan. Kekacauan terjadi dikarenakan pertanyaan seorang pendengar yang tidak terjawab dengan baik. Golongan penanya tersebut kemudian pergi meninggalkan majelis. Bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara bedug ditabuh. Suara bedug tersebut ditabuh sebagaimana suara bedug "titir" yang menandakan suatu hal buruk sedang terjadi, seperti misalnya rumah terbakar atau perkelahian. Meskipun tidak terjadi hal-hal yang serius namun kekacauan tersebut mendapat perhatian polisi penjaga keamanan.³¹

Selanjutnya perselisihan lebih banyak terlihat dari golongan Nahdlatul Ulama yang mewakili aliran kuno dan Muhammadiyah yang mewakili aliran baru. Sebagaimana yang pada umumnya terjadi di Indonesia, pertentangan antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah lebih menonjol pada perbedaan dalam masalah *khilafiyah*. Menurut Saifuddin Zuhri dalam bukunya *Guruku Orang-Orang dari Pesantren* beberapa ulama Nahdlatul Ulama kerap melakukan diskusi dengan orang-orang Muhammadiyah. Kyai Adzkiya dari Kroya merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang cerdas dan pandai berdebat. Ia kerap datang ke kongres Muhammadiyah untuk melakukan diskusi tentang masalah *khilafiyah* antara kedua organisasi tersebut. Adapun masalah *khilafiyah* yang banyak diperdebatkan adalah seputar, pembacaan niat shalat "*ushalli*", pembacaan azan dan doa talqin pada jenazah, tahlilan, serta beberapa hal lainnya.³²

Di antara kedua golongan tersebut, menurut Hasanmihardja, pemerintah Hindia Belanda lebih condong kepada Muhammadiyah. Pemerintah seolah-olah membantu dan melindungi Muhammadiyah, meskipun menurutnya pemerintah sebenarnya juga merasa cemas dan terancam atas kemajuan Muhammadiyah di Purwokerto.³³ Kedekatan Muhammadiyah dengan pemerintah cukup masuk akal karena secara pemikiran Muhammadiyah lebih modern dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama. Ditambah lagi, pemikiran aliran tradisional yang menganggap bahwa mengikuti gaya hidup Barat merupakan salah satu bentuk kekafiran.

b. Kampung Kauman Lama

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang Dari Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 6-7.

³³ Hasanmihardja, "Sedjarah Muhammadiyah Di Purwokerto," hlm. 13.

Meskipun terdapat perbedaan di antara kedua golongan tersebut, bukan berarti keduanya tidak dapat hidup berdampingan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kampung Kauman Lama di Purwokerto. Kampung Kauman Lama terletak di Purwokerto Lor, Kota Purwokerto bagian utara. Kampung ini sebelumnya merupakan pusat kota di sebelah selatan Pasar Wage yang ditinggali oleh Cakrawedana. Daerah tersebut selanjutnya kosong dan ditinggali oleh pedagang Cina sampai berdiri sebuah Klenteng di wilayah tersebut.³⁴ Di sebelah barat wilayah tersebut terdapat kampung yang pada masa penyebaran Islam di Purwokerto menjadi persinggahan para pedagang Islam.³⁵

Selanjutnya kampung ini menjadi salah satu saksi perkembangan organisasi Islam di Purwokerto. Setidaknya terdapat tiga organisasi Islam yang berkembang di Kampung Kauman Lama, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Ahmadiyah. Perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kauman Lama dapat dilihat dari berdirinya masjid di kampung tersebut. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah semata namun juga sebagai tempat pendidikan sekaligus dakwah. Masjid dapat menjadi tempat berkumpulnya jamaah-jamaah dari organisasi-oranisasi tersebut. Bentuk awal bangunan tersebut lebih tepat disebut dengan langgar.³⁶

Langgar pertama yang dibuat adalah langgar atau masjid Kauman Lama yang diprakarsai oleh Kyai Murmabesari, Murmawitana, Hasan Muhammad, dan beberapa tokoh lainnya. Masjid ini berdiri di atas tanah wakaf dan selesai dibangun pada 22 April 1921.³⁷ Kini Masjid ini dikenal sebagai Masjid Istiqomah di bawah naungan Nahdlatul Ulama.³⁸ Selain itu tokoh Nahdlatul Ulama yang cukup terkenal sekaligus guru dari Saifuddin Zuhri, Kyai Akhmad Bunyamin juga tinggal di Kampung Kauman ini. Ia sempat menjadi mursyid Tarekat Syadziliyyah di Sokaraja. Menurut M. Rofiq Widadi yang dikutip oleh Akhmad Saefudin, Kyai A. Bunyamin kerap dikunjungi oleh Jendral Sudirman setiap kali ia akan berangkat berperang untuk meminta restu.³⁹

Organisasi selanjutnya adalah organisasi Muhammadiyah. Eksistensi organisasi Muhammadiyah di kampung ini juga tidak terlepas dari dibangunnya masjid Muhammadiyah. Adapun masjid Muhammadiyah pertama yang dibangun di Kauman Lama adalah *langgar ngandap asem*. Langgar ini dibangun oleh saudagar batik anggota Muhammadiyah Yastrawireja. Luas masjid tersebut sekitar 6 x 11 meter persegi. Di langgar tersebut Muhammadiyah mengadakan pengajian "*gerumbul*". Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberantas cara

³⁴ Rachmaningtiyas Wietda Ayu Nirmandini, "Perkembangan Kampung Kauman Lama Purwokerto Lor" (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), tidak dipublikasikan, hlm. 30.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid., hlm. 30.

³⁷ Tertulis dalam monumen peresmian yang terpasang di dalam Masjid al-Istiqomah.

³⁸ Nirmandini, "Perkembangan Kampung Kauman Lama Purwokerto Lor," hlm. 31.

³⁹ Akhmad Saefudin, *Riwayat Ringkas 17 Ulama Banyumas* (Yogyakarta: Titian Wacana, 2012), hlm. 41.

pengajaran Islam yang mengarah pada taklid buta dan mematikan akal serta pikiran umat Islam.⁴⁰

Tidak hanya organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berkembang di kampung Kauman Lama, gerakan Ahmadiyah Lahore juga berkembang di kampung ini sejak tahun 1930 M. Tokoh-tokoh Ahmadiyah awal seperti R. Ng. Djojosingito dan Wali Ahmad Baig bertempat tinggal di kampung ini.⁴¹ Tokoh-tokoh inilah yang kemudian menyebarkan dakwah gerakan Ahmadiyah Lahore.

Perlu diketahui bahwa sebelumnya R. Ng. Djojosingito menduduki posisi penting di keorganisasian Muhammadiyah Pusat sebagai sekretaris. Oleh karena itu kedatangannya di Purwokerto mendapat cukup banyak perhatian dari masyarakat. Djojosingito kemudian menyampaikan pengajaran-pengajaran agama. Hal tersebut dilakukan sebelum Djojosingito diketahui telah keluar dari Muhammadiyah dan memilih bergabung dengan Ahmadiyah. Kabar bahwa Djojosingito merupakan anggota Ahmadiyah disampaikan oleh utusan *hoofdbestuur* Muhammadiyah Yogyakarta.⁴²

Setelah Djojosingito diketahui sebagai anggota Ahmadiyah, tidak berarti gerakan Ahmadiyah dijauhi. Pengajaran Djojosingito tadi bahkan telah berhasil mengajak beberapa anggota Muhammadiyah Purwokerto untuk masuk ke gerakan Ahmadiyah Lahore, seperti misalnya Kyai Ma'ruf ketua Persyarikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto pertama.⁴³ Selain Djojosingito, pembawa paham Ahmadiyah Lahore pertama di Indonesia, Wali Ahmad Baig yang tinggal di kediaman Sanudji di Kauman Lama, berperan besar dalam pengajaran pemikiran-pemikiran di wilayah Kauman Lama khususnya dan Purwokerto pada umumnya. Tinggalnya pendakwah Ahmadiyah dari India tersebut di Kauman Lama memberikan semangat terhadap gerakan Ahmadiyah Lahore di Indonesia.⁴⁴

c. Gerakan Pemuda

Pada awal abad ini bermunculan berbagai gerakan pemuda di Indonesia. Gerakan pemuda tersebut biasanya berbasis gerakan kepanduan. Munculnya organisasi keagamaan di Purwokerto turut mendorong munculnya gerakan pemuda. Organisasi keagamaan yang berkembang di Purwokerto tidak hanya memfokuskan kegiatan pada hal-hal keagamaan, namun juga membina para pemudanya agar menjadi lebih berkualitas. Setiap organisasi memiliki gerakan pemudanya masing-masing.

⁴⁰ Ibid.; Hasanmihardja, "Sedjarah Muhammadiyah Di Purwokerto," hlm. 20-21.

⁴¹ Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, hlm. 236.

⁴² Suwarno, ed. *Sejarah Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Di Purwokerto Dan Perkembangannya Sampai Tahun 1945*, hlm. 26.

⁴³ Ibid., hlm. 27.

⁴⁴ Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, hlm. 236.

Gerakan pemuda Islam yang pertama di Purwokerto pada awal abad ke-20 M adalah *Jong Islamieten Bond*. Berdasarkan salah satu tulisan yang terdapat dalam koran *Bendera Islam*, pada bulan September 1926 M Kasman mendirikan *Jong Islamieten Bond* cabang Purwokerto.⁴⁵ Sebelumnya Kasman mengadakan perkumpulan dengan murid-murid *Kweekschool* dan MULO. Gerakan *Jong Islamieten Bond* merupakan gerakan intelektual pemuda yang diprakarsai oleh Sjamsoeridjal pada tahun 1925 M, yang kemudian mendapatkan dukungan dari H. Agus Salim. Perkumpulan ini lebih menekankan pada persatuan pemuda Islam. *Jong Islamieten Bond* berupaya menjadi wadah untuk mendidik pemuda Islam agar memiliki dasar keagamaan Islam yang kokoh.⁴⁶

Beberapa tahun kemudian organisasi Muhammadiyah juga mendirikan sebuah gerakan pemuda. Muhammadiyah menamai gerakan pemudanya dengan sebutan *Hizbul Wathon* atau biasa di singkat H.W. Di Purwokerto gerakan ini mulai diadakan setelah dibentuknya H.I.S *Met den Qur'an* pada tahun 1932 M. Beberapa tahun kemudian pada bulan Juli 1939 M, H.W. Karesidenan Banyumas telah dapat menyelenggarakan kegiatan Jambore di lapangan sepakbola Purwokerto.⁴⁷ Gerakan ini terdiri dari pemuda-pemuda dengan rentang usia 10-18 tahun. Di akhir pekan kegiatan yang diadakan berupa latihan-latihan ketangkasan dan kepanduan dengan pakaian kuning kunyit, celana biru tua, dan sapu tangan leher berwarna hijau.⁴⁸ Gerakan ini melatih pemuda agar lebih disiplin dan teratur. Salah satu tokoh kemerdekaan Jenderal Sudirman pernah menjadi pimpinan gerakan *Hizbul Wathon* Banyumas.⁴⁹

Begitupula dengan Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama menamai gerakan pemudanya dengan sebutan *Nasyi'in*. *Nasyi'in* merupakan kelompok mubaligh muda. Tugas mereka adalah untuk membantu juru dakwah yang pada umumnya terdiri dari para kyai. Kelompok *Nasyi'in* juga mengadakan kursus guna menambah kecakapan anggotanya. Beberapa di antaranya adalah kursus pidato, berdakwah, dan memperdalam pengetahuan agama. Dalam perkembangannya *Nasyi'in* kemudian diubah menjadi Ansor. Ansor biasa disebut sebagai angkatan muda Nahdlatul Ulama.⁵⁰ Tugasnya tidak jauh berbeda dengan *Nasyi'in*. Ansor bertugas membantu jalannya kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama.

Gerakan-gerakan pemuda tersebut menjadi salah satu bukti adanya perkembangan Islam di Purwokerto. Umat Islam di Purwokerto telah mengenal

⁴⁵ "Poerwokerto Tamoe Ketinggalan", dalam *Bendera Islam*, No. 53, Tahun ke-3, Kamis, 22 Rabiul Awwal 1345 atau 30 September 1926.

⁴⁶ Ibid., Lihat juga Agustina Dwi Pramuji Astut, "Pergerakan Nasional Pemuda Islam (Studi Tentang Jong Islamieten Bond 1925-1942)" (skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010), hlm. 81.

⁴⁷ Suwarno, ed., *Sejarah Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Di Purwokerto Dan Perkembangannya Sampai Tahun 1945*, hlm. 34.

⁴⁸ Hasanmihardja, "Sedjarah Muhammadiyah Di Purwokerto," hlm. 10.

⁴⁹ Soemarsono, *Mengenang Almarhum Panglima Besar Jenderal Soedirman* (Yogyakarta: Corps Cacat Veteran Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, tt), hlm. 11.

⁵⁰ Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, hlm. 106-110.

sistem kaderisasi. Sistem kaderisasi inilah yang selanjutnya dapat meneruskan perjuangan umat Islam di Purwokerto. Pada masa kemerdekaan gerakan-gerakan pemuda ini bahkan ikut berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

3. Bidang Pendidikan

Pada awal abad ke-20 M, pendidikan di Indonesia diwarnai oleh sistem pendidikan barat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dunia pendidikan di Purwokerto juga turut berkembang dikarenakan adanya kebijakan pencerdasan rakyat pribumi oleh pemerintah Hindia Belanda. Meskipun begitu, sistem pendidikan yang dijalankan oleh Hindia Belanda tidak dapat dikatakan sempurna. Belanda hanya menekankan pendidikan untuk kepentingan Pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat pribumi,⁵¹ pembelajaran agama tidak dimasukkan ke dalam pengajarannya. Hal ini menuntut kalangan umat Islam untuk mengadopsi sistem pendidikan Barat dengan pengajaran agama Islam di dalamnya. Selain itu banyaknya jumlah umat Islam yang pergi haji ke Tanah Suci dan bermukim di sana pada abad sebelumnya, kemudian kembali ke Tanah Air, menurut Mahmud Yunus menjadi salah satu faktor munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya.⁵²

Di Purwokerto pendidikan agama Islam yang berkembang dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Pendidikan tradisional dapat disamakan dengan sistem pendidikan informal. Sebagai gambaran, secara sederhana pengajaran dilakukan di surau-surau, langgar, masjid, atau serambi rumah kyai. Para murid berkumpul secara melingkar mendengarkan pengajaran dari kyai. Adapun pendidikan modern merupakan sistem pendidikan yang diadopsi dari barat. Pengajaran dilakukan di kelas-kelas dengan bangku, meja, dan papan tulis. Terdapat jenjang-jenjang kelas yang dibagi sesuai kemampuan murid.⁵³

a. Pendidikan Islam Tradisional

Sistem pendidikan tradisional telah berjalan bertahun-tahun sebelum abad ke-20 M. Menurut Hasnida dalam artikelnya yang berjudul “Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, dan Sekutu)”, setidaknya terdapat tiga sistem pendidikan tradisional Islam di Indonesia. Pertama, sistem pendidikan peralihan Hindu Islam. Sistem ini mengadopsi kebiasaan pendidikan Hindu Budha yaitu sistem keraton dan sistem pertapa. Pada sistem keraton murid-muridnya terdiri dari para putra bangsawan dan kalangan keraton, sedangkan sistem pertapa murid-muridnya mendatangi tempat pertapaan atau kediaman sang guru. Sistem pendidikan pertapaan tersebut juga dapat ditemukan di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

⁵¹ Djohan Makmur, *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 75.

⁵² Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992), hlm. 228-229.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 34 dan 63; Zuhairini et al., *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 211 dan 217.

Kyai-kyai pesantren biasanya mengadakan ceramah-ceramah tertentu yang kemudian dihadiri oleh umat muslim dari wilayah-wilayah lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Saifudin Zuhri dalam bukunya *Berangkat dari Pesantren*, ia pernah berjalan dari kediamannya di Sokaraja ke pesantren Mersi untuk mendengarkan ceramah dari Kyai Haji Abdul Jamil mengenai teknik pembacaan al Qur'an.⁵⁴

Kedua, sistem pendidikan surau atau *langgar*. Sistem pendidikan ini menggunakan metode ceramah, membaca, dan menghafal. Para murid duduk melingkar sembari menyimak pengajaran dari gurunya. Sistem ini juga biasa disebut dengan istilah *halaqah*. Ketiga, sistem pendidikan pesantren. Di antara dua sistem pendidikan tradisional sebelumnya sistem pendidikan ini dapat dikatakan lebih terlembaga secara institusi. Ada dua metode pendidikan yang digunakan di sini yaitu metode individu atau *sorogan* dan kolektif atau *bandongan*. Metode pertama dilakukan secara individu antara kyai dan santri. Kyai bertugas memberikan contoh dan mengevaluasi bacaan kitab santrinya. Metode kedua dilakukan secara berkelompok dengan mendengarkan ceramah dari sang kyai.⁵⁵

Di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, hingga awal abad ke-20 M, pendidikan tradisional masih dapat ditemukan bahkan beberapa tetap dilestarikan hingga saat ini. Sistem pendidikan tradisional yang terdapat di wilayah Purwokerto dan sekitarnya adalah sistem pendidikan pesantren. Keberadaan pesantren di Purwokerto lebih banyak ditemukan di luar daerah kota. Beberapa di antaranya yang diketahui eksistensinya pada awal abad ke-20 M adalah pesantren Karang Sari yang diasuh oleh Kyai Dimiyati, pesantren Mersi yang diasuh oleh Kyai Haji Abdul Jamil, dan pesantren Kebumen yang diasuh oleh Kyai Mashuri.⁵⁶ Ketiganya berada di luar kota Purwokerto. Pesantren-pesantren tersebut biasanya mengajarkan pelajaran fikih, akidah, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan bacaan al Qur'an.

Selain di pesantren-pesantren, pengajaran agama Islam di Purwokerto juga banyak dilakukan di langgar atau masjid-masjid. Pengajaran agama Islam dilakukan dengan metode pengajian atau mendengarkan ceramah dari Kyai. Masjid Besar Purwokerto sebagai salah satu masjid yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Purwokerto sejak kisaran tahun 1920 M kerap mengadakan pengajian setelah shalat Maghrib hingga memasuki waktu Isya. Salah satunya adalah pengajian tafsir al Qur'an. Terkadang mubaligh-mubaligh dari luar kota juga diundang untuk mengisi pengajian di Masjid Besar.⁵⁷ Adapun di langgar-langgar kecil lainnya pengajaran al Qur'an masih tetap berlangsung.

⁵⁴ Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, hlm. 77.

⁵⁵ Hasnida, "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, dan Sekutu)," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16 (2017): hlm. 246-247

⁵⁶ Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, hlm. 43, 44, dan 119.

⁵⁷ Hasanmihardja, "Sedjarah Muhammadiyah Di Purwokerto," hlm. 4-5.

Organisasi-organisasi keagamaan memiliki andil cukup besar dalam pengadaan pengajian-pengajian di langgar-langgar. Muhammadiyah mengadakan pengajian “*gerumbul*” di langgar-langgar yang didirikannya. Dalam pengajian tersebut diajarkan pengetahuan agama Islam yang sesuai dengan ajaran al Qur’an dan Hadis.⁵⁸ Ahmadiyah mengadakan pengajian dengan tema yang berbeda-beda di masjid *as-Salam* yang terletak di kampung Pejagalan, kelurahan Purwokerto Kidul. Tema-tema yang dikaji adalah al Qur’an, sabda *kawasa*, perjuangan *khalifah-khalifah*, bahasa Arab, dan sejarah Nabi.⁵⁹

b. Pendidikan Islam Modern

Perkembangan pendidikan Islam modern tidak terlepas dari sistem pendidikan barat yang telah lebih dulu hadir di masyarakat. Sistem kelas dan berjenjang menjadi salah satu pembeda antara pendidikan tradisional dan modern. Mata pelajaran umum juga diadopsi untuk melengkapi wawasan murid, meskipun mata pelajaran agama yang lebih diutamakan. Pendidikan Islam modern di Indonesia umumnya disebut madrasah.⁶⁰ Lagi-lagi keberadaan organisasi keagamaan berperan besar terhadap terbentuknya sekolah-sekolah Islam modern.

Pada awal abad ke-20 M, di Purwokerto telah berdiri beberapa sekolah Islam dengan sistem pendidikan modern. Muhammadiyah cabang Purwokerto mendirikan sekolah Islam modern yang pertama dengan nama “H.I.S. *met den Qur’an*” pada tahun 1926 M. Sekolah ini terdiri dari 7 tingkatan kelas. Pada masa awal berdirinya H.I.S. Muhammadiyah hanya memiliki 8 orang murid. Hingga tahun 1933 M, siswa yang bertahan hingga duduk di kelas VII berjumlah 6 orang. Beberapa tahun kemudian, pada tahun ajaran 1934/1935 didirikan sekolah Mulo Muhammadiyah sebagai kelanjutan dari H.I.S. Muhammadiyah. Pada saat awal pembukaannya sekolah ini memiliki 15 orang murid. Namun sangat disayangkan karena Mulo Muhammadiyah hanya bertahan kurang dari satu tahun, karena sedikitnya murid yang masuk. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dibuatlah Madrasah Wustho Mu’alimin pada tahun 1936. Madrasah ini merupakan madrasah diniyah setingkat SMP. Pelajaran yang diajarkan seputar pelajaran agama dan bahasa Arab. Waktu pengajarannya dilakukan siang hari dari pukul 14.00-16.00 WIB.⁶¹

Selain Muhammadiyah, organisasi Nahdlatul Ulama juga mendirikan sebuah madrasah di Purwokerto. Madrasah tersebut adalah *Madrasah Mamba’ul ‘Ulum*. Berdasarkan keterangan yang ditulis oleh Saifuddin Zuhri, sekolah ini didirikan di belakang Masjid Jami’ Purwokerto. Berdirinya madrasah ini diprakarsai oleh beberapa alumni Mamba’ul ‘Ulum Solo. Mereka bekerja sama dengan pihak

⁵⁸ Ibid., hlm. 21.

⁵⁹ Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, hlm. 238-239.

⁶⁰ Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*, hlm. 328.

⁶¹ Hasanmihardja, “Sedjarah Muhammadiyah Di Purwokerto,” hlm. 9; Suwarno, ed., *Sejarah Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Di Purwokerto Dan Perkembangannya Sampai Tahun 1945*, hlm. 30-34.

penghulu Masjid Jami' Purwokerto. Menurut pemaparannya pula bahwa Madrasah Mamba'ul 'Ulum Purwokerto telah mengalami kemajuan.⁶² Jika dirunut dengan Madrasah Mamba'ul Ulum Solo sebagai acuannya, maka Madrasah Mamba'ul Ulum Purwokerto memiliki sistem kelas-kelas dari kelas I sampai dengan kelas XI.⁶³

c. Penggunaan Literatur Islam sebagai Sarana Pendidikan

Di samping sistem pendidikan Islam, penggunaan literatur Islam juga merupakan salah satu hal yang berpengaruh pada perkembangan intelektual umat Islam. Pada awal abad ke-20 M, literatur-literatur Islam juga dipelajari di Purwokerto. Literatur Islam yang banyak ditemukan di wilayah Purwokerto adalah literatur Islam tradisional. Pesantren-pesantren menjadi pusat kajian literatur Islam. Di pesantren literatur Islam biasa disebut dengan kitab kuning.⁶⁴ Kitab ini mengkaji berbagai ilmu keislaman, seperti fikih, bahasa arab, 'aqaid atau *ushuluddin*, sejarah nabi, tafsir al Qur'an, tajwid, hadis, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian Saifuddin Zuhri dalam bukunya *Berangkat dari Pesantren*, beberapa kitab yang diajarkan di pesantren di wilayah Purwokerto dan sekitarnya yaitu *Safinah an-Naja* kitab pedoman pelajaran fikih dan *ushuluddin* karangan Syaikh Salim bin Samir al-Hadrami, *Tafsir Jalalain* karangan Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Fatthulqarib* karangan Abi Syuja', *al-Jurumiyah*, *Imrithi*, *Alfiyah*, *Fathul-Mu'in*, *Bulughul Maram*, dan lain sebagainya. Selain di pesantren, lembaga pendidikan model klasikal seperti madrasah Mamba'ul 'Ulum juga menggunakan beberapa kitab tersebut.⁶⁵

Literatur Islam lainnya yang diajarkan di Purwokerto adalah literatur dari Gerakan Ahmadiyah. Gerakan Ahmadiyah memiliki literaturnya sendiri. Untuk menambah wawasan para pengikutnya diajarkan Tafsir al Qur'an Ahmadiyah dan *Wedharing Sabda Kawasa*. Selain itu, pengurus besar juga mengirimkan buku-buku dan majalah Ahmadiyah seperti *Moeslim*, *Correspondentie Blad*, Risalah Ahmadiyah, dan *Wasita Adi* (buku berbahasa Jawa untuk anak-anak).⁶⁶

Literatur Islam sebenarnya telah tersebar di Purwokerto sejak sebelum abad ke-20 M, terutama untuk kitab-kitab Islam tradisional. Seiring dengan modernisasi yang terjadi di Purwokerto penyebaran literatur Islam semakin banyak digunakan di Purwokerto. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan sistem pendidikan Islam dan masuknya organisasi-organisasi Islam. Keduanya membawa literatur-literatur Islam baru yang diperlukan untuk mengajarkan wawasan keislaman sesuai dengan pemahaman kelompok mereka masing-masing. Literatur-literatur tersebut didapat dari jaringan organisasi dan instansi pendidikan di beberapa wilayah lainnya. Masuknya literatur Islam ke Purwokerto juga tidak terlepas dari peran ulama dan

⁶² Zuhri, *Guruku Orang-Orang Dari Pesantren*, hlm. 23.

⁶³ Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, hlm. 286-287.

⁶⁴ Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, hlm. 123.

⁶⁵ Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, hlm. 286-287; Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, hlm. 123-124.

⁶⁶ Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, hlm. 240.

kaum terpelajar muslim. Mereka mengajarkannya di masjid, langgar, dan lembaga pendidikan Islam sebagai sarana pengajaran agama Islam.

4. Bidang Keagamaan

Sebenarnya sejak abad 19 M, kegiatan keagamaan di wilayah Purwokerto telah berjalan dengan baik. Hingga awal abad ke-20 M, kegiatan keagamaan di Kabupaten Purwokerto lebih banyak dilakukan di desa-desa dengan masing-masing kyai lokalnya. Kegiatan keagamaan masih banyak dipengaruhi oleh gerakan tarekat dan kebudayaan lokal. Selanjutnya pada dasawarsa kedua abad ke-20 M, umat Islam mulai berkembang secara intelektual hal ini turut memengaruhi kehidupan keagamaan umat Islam di Purwokerto. Berikut adalah beberapa fenomena keagamaan yang terjadi di Purwokerto pada awal abad ke-20 M:

a. Meningkatnya Kesadaran akan Identitas Keislamannya

Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan masjid. Sebagaimana kita ketahui bahwa masjid merupakan identitas seorang muslim selain sebagai sarana peribadatan. Hal ini sejalan dengan semakin maraknya pembangunan gereja-gereja di Purwokerto pada masa tersebut. Salah satu masjid yang berpengaruh di Purwokerto yang dibangun pada dasawarsa awal abad ke-20 M adalah Masjid Jami' Purwokerto.

Masjid Jami' Purwokerto dibangun pada tahun 1910 M, yang diprakarsai oleh Bupati Pangeran Arya Mertadireja III, R. Mochamad Dirdjo, K.H. Muslih, dan K.H. Syamsuri Ridwan. Masjid ini dibangun di atas tanah wakaf milik R. Mochamad Dirdjo⁶⁷ yang terletak di sebelah barat alun-alun Purwokerto.⁶⁸ Masjid Jami' Purwokerto menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan karena terletak berdampingan dengan kantor penghulu *landraad* Purwokerto. Beberapa kegiatan yang diadakan di masjid ini pada kisaran waktu tersebut berupa pengajian kitab kuning, pengadaan kursus dakwah untuk para guru ngaji, pengajian baca al Qur'an, dan lain sebagainya.⁶⁹ Masjid ini dapat menjadi salah satu bukti eksistensi Islam di Kabupaten Purwokerto di tengah gencarnya gerakan misionaris Kristen maupun Katolik.

Selain itu langgar-langgar, mushola, dan masjid lain juga dibangun dari kekayaan serta swadaya masyarakat Islam. Organisasi Muhammadiyah misalnya telah mendirikan setidaknya 7 musholla yang tersebar di beberapa wilayah di Purwokerto, seperti Sawangan, Purwokerto Lor, Kedungwuluh, Tipar, dan lain sebagainya.⁷⁰ Masjid Nahdlatul Ulama di Kauman juga didirikan di atas tanah wakaf umat Islam dan dibangun dengan biaya swadaya masyarakat.⁷¹ Golongan

⁶⁷ Keterangan wakaf tertulis di bagian depan Masjid Agung Baitussalam.

⁶⁸ Wawancara dengan bapak H. Safin Santarwi, S.Pd.I imam Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, pada tanggal 26 April 2018..

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Hasanmihardja, "Sedjarah Muhammadiyah Di Purwokerto," hlm. 21.

⁷¹ Nirmandini, "Perkembangan Kampung Kauman Lama Purwokerto Lor," hlm. 30.

Ahmadiyah mendirikan satu langgar di Tipar di atas tanah milik H. Abdurrahim dan satu masjid di Pejagalan pada tahun 1933 M.⁷²

Selanjutnya untuk jumlah jamaah haji yang berangkat ke tanah suci, pada kisaran tahun 1930-an M di Purwokerto memang tidak sebanyak wilayah lainnya di sekitarnya. Namun, berdasarkan catatan Pemerintah Hindia Belanda, dari tahun 1933 – 1937 M jumlah jama'ah haji dari Karesidenan Banyumas yang termasuk di dalamnya Purwokerto mengalami peningkatan.

Jumlah jama'ah Haji dari Karesidenan Banyumas

Tahun	1933	1934	1935	1936	1937
Jumlah	14	20	16	33	39

Jumlah tersebut sebenarnya tidak cukup baik, karena wilayah lain di Jawa khususnya, sebagian besar telah mencapai angka 50 jiwa. Seperti misalnya jumlah jama'ah haji pada tahun 1937 M paling banyak berasal dari Priangan 350 jiwa, Surabaya 194 jiwa, dan Pekalongan 158 jiwa.⁷³

b. Pengaruh Gerakan Pembaharuan terhadap Kegiatan Keagamaan

Salah satu fokus gerakan pembaharuan di Indonesia adalah memurnikan kegiatan keagamaan yang telah berkembang di masyarakat dari bid'ah, tahayul, dan khurafat. G.J. Pijper dalam bukunya *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950* mengungkapkan,

“sampai dengan tahun-tahun permulaan abad ini (abad ke-20 M), kehidupan keagamaan di Indonesia dapat diibaratkan sebagai sebuah kolam yang tenang, permukaan airnya hanya sekali-sekali saja beriak. Kurang lebih dua puluh tahun kemudian segalanya berubah: yaitu tidak lagi merupakan kolam yang tenang, namun telah berubah menjadi suatu aliran sungai yang sewaktu-waktu meluap.”

Hal ini banyak disebabkan oleh aliran pembaharuan yang muncul dan berkembang dengan deras di Indonesia. Berbeda dengan kegiatan-kegiatan sosial dan politik yang cenderung dapat berjalan beriringan, aliran pembaharuan dalam kegiatan keagamaan menimbulkan pertentangan-pertentangan.⁷⁴ Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa umat Islam di Purwokerto dalam paham keagamaan terbagi menjadi dua yaitu aliran baru dan aliran kuno. Hal ini kemudian berdampak pada kegiatan keagamaan di Purwokerto. Pemikiran keagamaan aliran baru mulai mewarnai kegiatan keagamaan di Purwokerto.

⁷² Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, hlm. 236-238.

⁷³ Samangesteld door het Central Kantoor voor de Statistiek van het Departement van Economische Zaken, *Indische Verslag 1938: Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie over Het Jaar 1937* (Batavia: Landsdrukkerij, 1938), hlm. 136.

⁷⁴ Pijper, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam Di Indonesia 1900-1950*, hlm. 105-106.

Beberapa kegiatan keagamaan yang berhasil diterapkan oleh aliran baru di Purwokerto adalah khotbah dengan bahasa yang dapat dipahami oleh penduduk, penyelenggaraan shalat hari raya di tanah lapang, dan penghapusan adzan dua kali sebelum shalat Jum'at.⁷⁵ Ketiga kegiatan keagamaan tersebut hasilnya dapat bertahan bahkan hingga saat ini. Selain itu kegiatan seperti penghapusan tradisi *suran*, *nyadran*, *slametan*, meminta syafaat pada kubur, serta hal-hal yang bersifat klenik sedikit berkurang, namun di wilayah luar kota kegiatan-kegiatan tersebut masih kerap dijumpai.⁷⁶

C. PENUTUP

Pada awal abad ke-20 M, wilayah Purwokerto mengalami perkembangan yang cukup berarti. Pada bidang politik wilayah Purwokerto mengalami perubahan administratif, kebijakan-kebijakan Belanda di Indonesia seperti desentralisasi, politik etis, hingga politik asosiasi juga diterapkan di wilayah Purwokerto. Pada bidang sosial, masyarakat Purwokerto mulai terlihat polarisasi kelas-kelas sosial mereka yang didasarkan pada pekerjaannya. Selanjutnya, adanya jalur transportasi berupa kereta api cepat berdampak pada perkembangan mobilitas di Purwokerto. Dalam bidang pendidikan, hingga dasawarsa ketiga abad ke-20 M, di Purwokerto telah berdiri banyak lembaga pendidikan. Hal-hal tersebut selanjutnya mempengaruhi perkembangan umat Islam di Purwokerto.

Sebelum abad ke-20 M, umat Islam di Purwokerto masih identik dengan gerakan-gerakan tarekat. Gerakan-gerakan yang masih banyak diliputi hal-hal yang bersifat sufistik. Kegiatan keagamaan juga belum dilakukan secara massal dan meluas. Masyarakat muslim di Purwokerto belum pula mengenal pengetahuan Islam yang lebih komprehensif. Pengetahuan-pengetahuan mengenai ilmu keislaman masih terbatas pada cara beribadah dan pembacaan al Qur'an. Mereka belum terorganisir secara baik. Mereka hanya terikat secara sosial oleh ritual keagamaannya.

Memasuki awal abad 20 M, perkembangan umat Islam di Purwokerto mulai dapat terlihat. Hal ini diawali dengan berdirinya Masjid Besar di pusat pemerintahan yang dikelola oleh dewan kepenghuluan. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan keagamaan mulai marak diadakan melalui pengajian-pengajian bersama di masjid. Pengajian-pengajian tersebut tidak hanya diisi oleh kiai-kiai lokal namun juga dari kiai yang berasal dari berbagai daerah di sekitarnya. Hal tersebut membawa pemikiran-pemikiran baru kepada umat Islam di Purwokerto. Sebagai dampaknya, muncullah berbagai organisasi keagamaan di Purwokerto, yaitu Serikat Islam, Muhammadiyah, Ahmadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Adanya organisasi-organisasi tersebut menjadi roda penggerak perkembangan umat Islam di Purwokerto. Beberapa di antaranya adalah adanya gerakan pemuda, kemajuan sistem pendidikan Islam, pengadaan sarana-sarana peribadatan, dan lain sebagainya.

⁷⁵ Hasanmihardja, "Sedjarah Muhammadiyah Di Purwokerto," hlm. 20.

⁷⁶ Ibid.

Di samping perkembangan-perkembangan tersebut umat Islam di Purwokerto juga terbagi ke dalam dua golongan. Golongan tersebut adalah aliran kolot atau kuno yang identik dengan golongan tradisi, sementara aliran baru atau kaum wahabi diidentikkan dengan golongan modern. Adanya aliran tersebut membawa pengaruh terhadap kegiatan keagamaan di Purwokerto, terutama dari aliran baru. Hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kemurnian Islam dan pemahaman keagamaan mereka (aliran baru), seperti halnya *taklid buta*, tahayul, bid'ah, dan khurafat, dihapuskan. Beberapa keberhasilan aliran baru dalam kegiatan keagamaan di Purwokerto adalah khotbah dengan bahasa yang dapat dipahami oleh penduduk, penyelenggaraan shalat hari raya di tanah lapang, dan penghapusan adzan dua kali sebelum shalat Jum'at.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Indonesia Dalam Arus Sejarah*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.
- Astut, Agustina Dwi Pramuji. "Pergerakan Nasional Pemuda Islam (Studi Tentang Jong Islamieten Bond 1925-1942)." Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
- Effendi. "Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje)." *TAPIS* 8, no. 1 (2012).
- Esposito, John. L. *Islam in Asia: Religion, Politics, & Society*. New York: Oxford University Press, 1987.
- Gobee, E, and C Adriaanse. *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936*. Jakarta: Insis, 1991.
- Hasanmihardja. "Sedjarah Muhammadiyah Di Purwokerto" (n.d.).
- Hasnida. "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, dan Sekutu)." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16 (2017). Accessed June 17, 2022. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6442>.
- Isma'il, Ibnu Qoyim. *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya Di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Maimunah, Siti. "Islam Indonesia Dalam Studi Sejarah, Sosial, Dan Budaya (Teori Dan Penerapan)." In *Islam Di Tengah Perubahan: Islam Di Surabaya Akhir Abad XIX-Awal Abad XX*, by Himayatul Ittihadiyah, Dudung Abdurahman, Maman A. Malik Sy, Zuhrotul Latifah, Soraya Adnani, Lathiful Khuluq, Herawati, Maharsi, and Imam Muhsin. Yogyakarta: PKSBI Jurusan SKI Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Makmur, Djohan. *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

- Margana, Sri, and M Nursam. *Kota-Kota Di Jawa: Identitas, Gaya Hidup, Dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: Ombak, 2010.
- Mulyasari, Prima Nurahmi. "Modernisasi Dan Tata Ruang Kota Purwokerto 1900-1935." *Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya* 15 (2014).
- Nirmandini, Rachmaningtyas Wietda Ayu. "Perkembangan Kampung Kauman Lama Purwokerto Lor." Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1996.
- Pijper, G.F. *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam Di Indonesia 1900-1950*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, and Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia V: Jaman Kebangkitan Nasional Dan Masa Akhir Hindia Belanda*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Saefudin, Akhmad. *Riwayat Ringkas 17 Ulama Banyumas*. Yogyakarta: Titian Wacana, 2012.
- Samangesteld door het Central Kantoor voor de Statistiek van het Departement van Economische Zaken. *Indische Verslag 1938: Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie over Het Jaar 1937*. Batavia: Landsdrukkerij, 1938.
- Santarwi, H. Safin, n.d.
- Soemarsono. *Mengenang Almarhum Panglima Besar Jenderal Soedirman*. Yogyakarta: Corps Cacat Veteran Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, tt.
- Steenbrink, Karel. *Kawan Dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda Dan Islam Di Indonesia (1596-1942)*. Translated by Suryan A Jamrah. Bandung: Mizan, 1995.
- Suwarno. *Sejarah Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Di Purwokerto Dan Perkembangannya Sampai Tahun 1945*. Purwokerto: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas Lembaga Pustaka dan Dokumentasi, 1997.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992.
- Zuhairini, Moh Kasiram, Abdul Ghofir, Tadjab, A. Malik Fadjar, and H. Maksum Umar. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Zuhri, Saifuddin. *Guruku Orang-Orang Dari Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Zuhri, Saifudin. *Berangkat Dari Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Zulkarnain, Iskandar. *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2011.

